

TINJAUAN YURISIS PENERAPAN TANDA TANGAN ELETRONIK PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA.

Kartika Pertiwi

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan yuridis penerapan tanda tangan elektronik pada transaksi elektronik di Indonesia dan kekuatan hukum Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Elektronik sebagai alat bukti digital di Indonesia. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder berupa sumber pustaka kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Keberadaan alat bukti digital saat ini sudah diakui sebagai alat bukti yang sah. Penerapan Tanda Tangan Elektronik di Indonesia harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori hukum L.Friedman yaitu menganalisis struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam hal struktur hukum meliputi kelengkapan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur ketentuan petunjuk pelaksanaan secara teknis terutama dalam hal standar mekanisme dan metode pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik. Dalam hal kelembagaan, instansi yang terkait dengan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik harus segera melengkapi struktur kelembagaan Penyelenggaraan Sistem, Transaksi, dan Tanda Tangan Elektronik. Dalam hal substansi hukum, belum ada peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih teknis permasalahan transaksi dan tanda tangan elektronik. Dapat disimpulkan bahwa penerapan Tanda Tangan Elektronik di Indonesia harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik. Aspek yang paling mempengaruhi kekuatan hukum dari Tanda Tangan elektronik adalah integritas dan autentikasi dari Tanda Tangan Elektronik dan dokumen elektronik yang ditandatangani.

Kata Kunci : transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, alat bukti digital

LEGAL STUDY OF IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC SIGNATURE ON ELECTRONIC TRANSACTION IN INDONESIA

Kartika Pertiwi

Abstract

This study was conducted to determine the judicial review application of electronic signatures in electronic transactions in Indonesia and the power law Electronic Signatures in Electronic Transactions as digital evidence in Indonesia. This research is conducted through the research method of normative juridical approach with secondary data sources references then analyzed using descriptive methods. The existence of the digital evidence is now recognized as valid evidence. Application of Electronic Signatures in Indonesia should refer to the applicable laws in Indonesia. Data analysis was performed using L.Friedman legal theory which analyzes the structure, substance, and legal culture. In terms of the legal structure includes completeness of legislation and institutional. Indonesia has Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 on Information and Electronic Transactions and Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 on the Implementation System and Electronic Transactions. However, Indonesia does not have regulations governing the provision of technical guidance in the implementation of standards, especially in terms of mechanisms and methods of implementation of the Electronic Signatures and Electronic Transactions. In institutional terms, institutions associated with the Operation System and Electronic Transactions must immediately complete the institutional structure of the Operation System, Transactions, and Electronic Signatures. In terms of the substance of the law, there are no rules derived from government regulation that regulates the technical problems of transactions and electronic signatures. It can be concluded that the application of the Electronic Signatures in Indonesia should refer to the applicable laws in Indonesia. Electronic Signatures has legal force and effect as valid if they meet the requirements and provisions set forth in Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Government Regulation No. 82 Year 2012 on the Implementation Certification and Electronic Transactions. Aspects that most affect the legal force of electronic Signature is of integrity and authentication of Electronic Signatures and documents electronically signed documents.

Keywords: electronic transactions, electronic signatures, digital evidence